



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, INSTITUT TEKNOLOGI KESEHATAN BALI
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.2 0-229.HH.04.04 TAHUN 2026
NOMOR: DL.02.02.1892.KS.V.2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Drs. I Wayan Redana, M.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, sah bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 **I Ketut Swarjana, S.KM., MPH., Dr.PH** : Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan (LPPM) Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, berdasarkan Surat

Keputusan Ketua YPPLPK Bali Nomor:
0111/YPPLPK/KP/IV/2024 tentang
Pengangkatan Pejabat Struktural di
Lingkungan ITEKES Bali selanjutnya dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Bali.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan (PPMPP), Institut Seni Indonesia Denpasar yang bernaung di bawah Dirjen DIKTI merupakan lembaga yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang patut didukung dan diimplementasikan;
3. Bahwa Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Pendidikan (LPPMPP), Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (KI);
4. Sentra Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Sentra KI adalah lembaga atau unit di dalam Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola Kekayaan Intelektual (KI) milik Universitas, Para Dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, secara keseluruhan atau sebagian, yang meliputi identifikasi, sosialisasi, pelayanan pendaftaran, pengajuan perlindungan, penilaian (valuasi), dan komersialisasi;
5. Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Nomor: W.20W.20-228.HH.04.04 TAHUN 2026 .04.04 TAHUDL.02.02.1891.KS.V.2026an Nomor: DL.02.02.1891.KS.V.2026Antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali dengan Institut Seni Indonesia Denpasar tentang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembentukan Sentra KI di Institut Seni Indonesia Denpasar yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program Sentra KI di lembaga **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk membentuk Sentra KI.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan petunjuk, saran, mediasi serta pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengurusan Sentra KI.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pembentukan Sentra KI diperuntukkan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaannya membentuk organisasi pelaksana Sentra KI untuk mengurus usulan permohonan KI dari dosen/sivitas akademika Institut Seni Indonesia Denpasar dan masyarakat Kota Denpasar.
- (3) Pemohon KI diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kewenangannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan sebelum selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 7

LAIN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*):
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat Selasaitandatan Dua Belas hari.. Mei., tanggal....., bulan,Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sete

lah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** se

ara baik dan sungguh-sungguh.

PIHAK PERTAMA

Kepala Divisi Pelayanan Hukum



Drs. I Wayan Redana, M.H.

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian
kepada Masyarakat, dan
Pengembangan Pendidikan



**I Ketut Swarjana, S.KM., MPH.,
Dr.PH**